GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 04 November 2006**
Subyek	**: PLTA**	**Hari**	**: Sabtu**
		Halaman	**: 05**

PLTA Malea Tana Toraja Belum Miliki Amdal

[MAKALE] Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malea, di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel) belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pihak Badan Pengawas Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tana Toraja sudah berulang kali meminta PT Bukaka, yang mengerjakan proyek itu, untuk melengkap Amdal, namun tidak digubris.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Jacobus Kamarlo Mayongpadang yang sedang reses di daerah pemilihannya itu, Kamis (2/11) sore menyampaikan soal keluhan Bapedalda Tana Toraja kepada *Pembaruan* melalui telepon selulernya.

"Kami sudah beberapa kali menyurati PT Bukaka yang mengerjakan PLTA Malea itu, tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya, sementara proyeknya sudah berbulan-bulan dikerjakan," ujar Jacobus menirukan Kepala Bapedalda Tana Toraja, Ir Yusuf Biringkanaya dalam pertemuan dengan sejumlah pihak terkait di daerah itu sehari sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut, katanya, selain Kepala Bapedalda, hadir pula Plt Kepala Dinas Kehutanan, Ir Ramon Palette, Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang (Sa'dan) Ir Iskandar dan sejumlah pimpinan lembaga swadaya masyarakat pencinta lingkungan di Tana Toraja, seperti Walda dan Lilin. Semua pihak yang hadir pada pertemuan itu mengeluhkan tidak adanya Amdal dari PLTA Malea itu.

Menurut Jacobus, sangat disayangkan, jika proyek besar bernilai miliaran rupiah yang dikerjakan perusahaan tersebut, tidak memiliki Amdal. Seharusnya kata Jacobus, perusahaan yang dimiliki pejabat tinggi negara itu memberi contoh yang baik dalam pengelolaan lingkungan.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Amdal pembangunan PLTA Malea sangat penting, tegasnya. Dengan Amdal itu, dampak negatif dari semua aspek bisa dieliminasi. Selain, dampak lingkungan, aspek sosial dan ekonomi maupun keamanan juga saling terkait dalam pembangunan proyek PLTA tersebut.

Deputy Komunikasi PT PLN Wilayah VIII Sulselrabar di Makassar, Agung Murdifi yang dihubungi di Makassar, Jumat (3/11) mengatakan, tidak tahu menahu soal Amdal tersebut. Menurut dia, sampai saat ini pihak Bukaka belum mengirim tembusan Amdal PLTA Malea tersebut ke PT PLN Wilayah VIII.

"Lebih baik langsung hubungi saja Direktur Bukaka, Heru Husaini," kata Agung menyodorkan nomor telepon seluler pejabat dimaksud.

Namun, Direktur Bukaka, Heru Husaini yang dihubungi Sabtu (4/11) pagi melalui telepon selulernya untuk konfirmasi masalah Amdal tersebut, hanya dijawab dengan permintaan meninggalkan pesan. Tetapi pesan yang ditinggalkan pun tidak dijawab hingga berita ini diturunkan pukul 10.00 WIB.

Pemilik Tanah

Sementara itu, mengenai proses ganti rugi tanah milik warga yang terkena proyek PLTA Malea, menurut Jacobus, juga tidak beres. Misalnya, petugas proyek langsung mendatangi pemilik tanah dengan hanya mengganti tanaman yang ada di atasnya, sedangkan tanahnya sendiri hanya dijanjikan akan dibayar kemudian.

Cara-cara seperti itu kata Jacobus, sangat rentan menimbulkan konflik horizontal dalam masyarakat. Apalagi, pembayarannya tidak merata, dan jauh dari harga yang selayaknya.

"Yang lebih rawan lagi, pada umumnya warga yang sudah berdiam di sana puluhan tahun, belum memiliki sertifikat tanah, sehingga bukan tidak mungkin, setelah tanah tergenang air nanti, mereka tidak bisa laggi menunjukkan tanah mereka, sementara surat-suratnya tidak lengkap," kata Jacobus mengingatkan.

Kalau tidak mau dituding sebagai pembawa konflik, perusahaan itu seharusnya cepat-cepat menyelesaikan Amdal PLTA Malea dulu dan membereskan semua ganti rugi tanah rakyat sebelum proyek itu dikerjakan lebih jauh. Jacobus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah diperdaya perusahaan yang menggarap proyek PLTA itu. [148/M-15]

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup